

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2024

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lamongan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



Ibrahim, A.Pi, M.S.i

NIP. 197403031998031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lamongan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara I



Ibrahim, A.Pi, MS.i

NIP. 197403031998031003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,637,902,479 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,637,902,479 atau mencapai 131.45 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2,006,750,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,880,306,058 atau mencapai 96.45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18,539,330,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp216,217,247,704 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10,415,014; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp216,206,832,690 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp173,811,377 dan Rp220,065,023,801

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,623,700,259 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18,267,949,047 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-15,644,248,788, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1,016,616,926 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14,627,631,862.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp219,420,697,171, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-14,627,631,862 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -14,525,442 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 15,286,483,934 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp220,065,023,801

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 6 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 9 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	2,006,750,000	2,637,902,479	131.45	2,515,936,663
JUMLAH PENDAPATAN		2,006,750,000	2,637,902,479	131.45	2,515,936,663
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	8,587,651,000	8,584,786,471	99.97	6,716,310,516
Belanja Barang	B.2.2	7,514,826,000	6,895,172,842	91.75	7,799,333,704
Belanja Modal	B.2.3	2,436,853,000	2,400,346,745	98.50	1,578,839,110
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		18,539,330,000	17,880,306,058	96.45	16,094,483,330

Lamongan, 31 Desember 2024
 Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Ibrahim, A. Pi, MS.i
NIP. 197403031990031003



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	2,623,700,259	2,252,837,467
Jumlah Pendapatan		2,623,700,259	2,252,837,467
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	8,587,838,771	6,716,179,667
Beban Persediaan	D.4	98,457,500	181,363,400
Beban Barang dan Jasa	D.5	5,161,872,748	5,214,360,973
Beban Pemeliharaan	D.6	559,711,941	1,255,512,988
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1,031,217,359	1,200,125,823
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	2,828,849,149	3,350,295,497
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	1,579	(9,743)
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		18,267,949,047	17,917,828,605
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(15,644,248,788)	(15,664,991,138)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	46,633,517	131,179,544
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	969,983,409	215,649,920
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1,016,616,926	346,829,464
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(14,627,631,862)	(15,318,161,674)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNPB	D.15	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(14,627,631,862)	(15,318,161,674)

Lamongan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	219,420,697,171	224,446,222,823
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(14,627,631,862)	(15,318,161,674)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(14,525,442)	(1,296,599,162)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	(14,615,359)	(1,296,601,764)
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	89,917	2,602
Jumlah		(14,525,442)	(1,296,599,162)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15,286,483,934	13,793,675,667
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		644,326,630	(2,821,085,169)
EKUITAS AKHIR	E.6	220,065,023,801	221,625,137,654

Lamongan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Ibrahim, A.Pi, MS.i

NIP. 197403031998031003



NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	7,008,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	6,381,843	20,084,296
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	325,915,750	343,583,409
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(325,601,579)	(325,689,917)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	3,719,000	1,100,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		10,415,014	46,085,788
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	4,808,138,400	4,808,138,400
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(786,550,926)	(685,456,042)
ASET TETAP			
Tanah	C.23	173,666,734,550	173,666,734,550
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	19,144,833,632	31,853,441,282
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	33,782,794,141	32,437,070,396
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	48,366,544,895	47,837,126,895
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	96,182,000	96,182,000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(58,850,256,528)	(70,352,395,268)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		216,206,832,690	215,538,159,855
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	88,781,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	(88,781,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		216,217,247,704	215,584,245,643
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	122,654,824	163,949,118
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	51,156,553	122,281,712
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		173,811,377	286,230,830

Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		173,811,377	286,230,830
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	220,065,023,801	219,420,697,171
JUMLAH EKUTAS		220,065,023,801	219,420,697,171
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		220,238,835,178	219,706,928,001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,006,750,000	2,006,750,000
Jumlah Pendapatan	2,006,750,000	2,006,750,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,349,952,000	8,587,651,000
Belanja Barang	7,514,826,000	7,514,826,000
Belanja Modal	2,436,853,000	2,436,853,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	17,301,631,000	18,539,330,000

Realisasi Pendapatan
Rp2,637,902,479

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,637,902,479 atau mencapai 131.45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,006,750,000. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,637,902,479. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,006,750,000	2,637,902,479	131.45
Jumlah	2,006,750,000	2,637,902,479	131.45

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 4.85 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,637,902,479	2,515,936,663	4.85
Jumlah	2,637,902,479	2,515,936,663	4.85

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,637,902,479 dan Rp2,515,936,663. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4.85 dari TA 2023 terdapat kenaikan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,637,902,479	2,515,936,663	4.85
Jumlah	2,637,902,479	2,515,936,663	4.85

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	46,477,000	226,221,782	(79.46)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	156,517	61,775,000	(99.75)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,320,732	2,753,280	56.93
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tuisi	897,276,847	743,312,222	20.71
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1,671,687,974	1,481,353,461	12.85
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,368,050	520,918	546.56
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	14,615,359	-	-
	-	-	-
Jumlah	2,637,902,479	2,515,936,663	4.85

B.2 Belanja

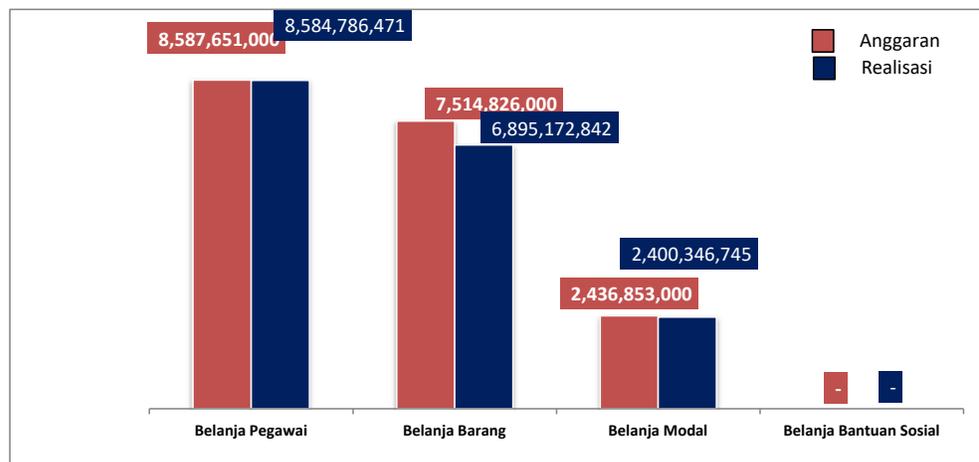
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp17,880,306,058 atau 96.45 % dari anggaran belanja sebesar Rp.18,539,330,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	8,587,651,000	8,584,786,471	99.97
Belanja Barang	7,514,826,000	6,895,172,842	91.75
Belanja Modal	2,436,853,000	2,400,346,745	98.50
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	18,539,330,000	17,880,306,058	96.45

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11.10% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	8,584,786,471	6,716,310,516	27.82
Belanja Barang	6,895,172,842	7,799,333,704	(11.59)
Belanja Modal	2,400,346,745	1,578,839,110	52.03
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17,880,306,058	16,094,483,330	11.10

Realisasi Belanja Pegawai
Rp8,584,786,471

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,584,786,471 dan Rp6,716,310,516. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 27.82 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai PPPK di tahun 2024

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,353,081,200	2,244,304,060	4.85
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,367	34,322	3.04
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	211,106,830	200,175,354	5.46
Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	232,798,000	206,502,000	12.73
Belanja Tunj. PPh PNS	21,163,704	6,737,109	214.14
Belanja Tunj. Beras PNS	149,040,360	157,223,820	(5.20)
Belanja Uang Makan PNS	326,207,000	344,732,000	(5.37)
Belanja Tunjangan Umum PNS	42,095,000	54,815,000	(23.21)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	787,681,200	241,073,000	226.74
Beban Pembulatan Gaji PPPK	18,172	6,823	166.33
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,775,460	12,929,570	246.30
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	8,586,203,926	6,716,675,516	27.83
Pengembalian Belanja Pegawai	1,417,455	365,000	288.34
Jumlah Belanja	8,584,786,471	6,716,310,516	27.82

Realisasi Belanja Barang
Rp6,895,172,842

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,895,172,842 dan Rp7,799,333,704. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 11.59% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terdapat penurunan belanja barang karena adanya penghematan Anggaran T.A 2024

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	3,017,767,824	2,778,732,121	8.60
Belanja Barang Non Operasional	422,000,600	395,107,796	6.81
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	101,076,500	145,900,000	(30.72)
Belanja Jasa	1,763,398,618	2,025,954,976	(12.96)
Belanja Pemeliharaan	559,711,941	1,255,512,988	(55.42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,031,217,359	1,200,125,823	(14.07)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6,895,172,842	7,801,333,704	(11.62)
Pengembalian Belanja	-	2,000,000	(100.00)
Jumlah Belanja	6,895,172,842	7,799,333,704	(11.59)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp2,400,346,745

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,400,346,745 dan Rp1,578,839,110. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 52.03% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh terdapat kenaikan belanja modal peralatan dan mesin berupa : kendaraan fungsional kendaraan bermotor roda empat, kendaraan bermotor roda tiga, alat pengolah data, Pembangunan Mess Operator, Instalasi Air Bersih dan Jalan Komplek Pelabuhan.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,477,205,000	353,555,950	317.81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	393,723,745	1,225,283,160	(67.87)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	529,418,000	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,400,346,745	1,578,839,110	52.03
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,400,346,745	1,578,839,110	52.03

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1,477,205,000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,477,205,000 dan Rp353,555,950, mengalami kenaikan sebesar 317.81 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh terdapat pengadaan peralatan dan mesin sebagai berikut :

Kendaraan fungsional Kendaraan Bermotor Roda empat dan tiga, Lemari Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Kursi Besi/Metal, A.C. Split, Televisi, P.C Unit, Lap Top, Tablet PC, dan Printer.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,477,205,000	353,555,950	317.81
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,477,205,000	353,555,950	317.81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,477,205,000	353,555,950	317.81

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp393,723,745

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp393,723,745 dan Rp1,225,283,160 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 67.87% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Terdapat rehab Bangunan gedung kantor dan gedung TPI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226,818,745	403,125,699	(43.73)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	166,905,000	822,157,461	(79.70)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	393,723,745	1,225,283,160	(67.87)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	393,723,745	1,225,283,160	(67.87)

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp529,418,000

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp529,418,000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan terdapat pemasangan instalasi air bersih.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	44,448,000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	44,448,000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	44,448,000	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2,623,700,259

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2,623,700,259 dan Rp2,252,837,467. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 16.46. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,320,732	2,753,280.00	56.93
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	956,359,702	740,790,400.00	29.10
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1,663,019,825	1,509,293,787.00	10.19
Jumlah	2,623,700,259.00	2,252,837,467.00	16.46

Beban Pegawai
Rp8,587,838,771

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8,587,838,771 dan Rp6,716,179,667.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 27.87 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya penambahan pegawai PPPK. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,353,081,200	2,244,304,060	4.85
Beban Pembulatan Gaji PNS	33,780	34,322	(1.58)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	211,106,830	200,175,354	5.46

Beban Tunj. Anak PNS	64,088,562	64,119,142	(0.05)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	232,798,000	206,502,000	12.73
Beban Tunj. PPh PNS	21,163,704	6,737,109	214.14
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	8,587,838,771	6,716,179,667	27.87

Beban Persediaan
Rp98,457,500

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp98,457,500 dan Rp181,363,400

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 45.71 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi dan persediaan bahan baku. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	98,457,500	126,703,400	(22.29)
Beban Persediaan bahan baku	-	54,660,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	98,457,500.00	181,363,400	(45.71)

Beban Barang dan Jasa
Rp5,161,872,748

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,161,872,748 dan Rp5,214,360,973.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.01 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya penurunan beban barang dan jasa dikarenakan adanya penghematan belanja. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	2,711,522,974	2,534,266,021	6.99
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	899,900	1,030,100	(12.64)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108,252,000	148,968,000	(27.33)
Beban Barang Operasional Lainnya	182,259,110	94,468,000	92.93
Beban Bahan	376,047,300	320,640,496	17.28
Beban Honor Output Kegiatan	12,500,000	45,574,000	(72.57)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,453,300	28,893,300	15.78
Beban Langganan Listrik	1,118,186,282	1,134,317,941	(1.42)
Beban Langganan Telepon	673,199	519,633	29.55
Jumlah	5,161,872,748	5,214,360,973.00	(1.01)

Beban Pemeliharaan
Rp559,711,941

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp559,711,941 dan Rp1,255,512,988.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 55.42 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh penurunan beban pemeliharaan dikarenakan adanya penghematan belanja. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151,872,720	503,422,761	(69.83)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311,269,887	424,872,502	(26.74)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	194,000,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	62,692,428	(100.00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	96,569,334	70,525,297	36.93
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	559,711,941	1,255,512,988	(55.42)

Beban Perjalanan Dinas
Rp1,031,217,359

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,031,217,359 dan Rp1,200,125,823

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 14.07 persen disebabkan oleh penurunan belanja beban perjalanan dinas dikarenakan adanya penghematan belanja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	563,223,596	907,093,272	(37.91)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,850,000	15,300,000	114.71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,950,000	65,000,000	(41.62)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	397,193,763	212,732,551	86.71
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1,031,217,359.00	1,200,125,823	(14.07)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2,828,849,149

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,828,849,149 dan Rp3,350,295,497.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	627,027,619	543,206,495	15.43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	724,789,155	390,649,975	85.53
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	758,448,500	1,937,491,582	(60.85)
Beban Penyusutan Irigasi	247,860,700	294,874,099	(15.94)
Beban Penyusutan Jaringan	369,628,291	184,073,346	100.80
Beban Penyusutan Properti Investasi	101,094,884	-	-
Jumah Penyusutan	2,828,849,149	3,350,295,497	(15.56)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2,828,849,149	3,350,295,497	(15.56)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp1,579

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,579 dan Rp-9,743

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	(12,999)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1,579	3,256	(51.50)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	1,579.00	(9,743)	(116)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp46,633,517

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46,633,517 dan Rp131,179,544

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	156,517	61,775,000.00	(100)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	46,477,000	226,221,782.00	(79)
Jumlah	46,633,517.00	131,179,544	(64)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp969,983,409

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp969,983,409 dan Rp215,649,920.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,368,050	520,918.00	546.56
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	952,000,000	215,129,002.00	342.53
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	14,615,359	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	969,983,409.00	215,649,920	349.80

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.219,420,697,171.00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.219,420,697,171.00 dan Rp.224,446,222,823.00

Defisit LO
Rp.14,627,631,862.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.14,627,631,862.00 dan Rp.15,318,161,674.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-14,525,442 dan Rp.-1,296,599,162 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.-14,615,359.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-14,615,359.00 dan Rp.-1,296,601,764.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(14,615,359)
Jumlah	(14,615,359.0)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp89,917

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.89,917 dan Rp.2,602. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	89,917
	-
Jumlah	89,917.0

Transaksi Antar Entitas Rp15,286,483,934

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15,286,483,934 dan Rp.13,793,675,667. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	17,880,306,058
Diterima dari Entitas Lain	(2,637,902,479)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	44,080,355
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	15,286,483,934

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 17,880,306,058, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 2,637,902,479

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp44,080,355 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp220,065,023,801*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.220,065,023,801.00 dan Rp.221,625,137,654.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Piutang Bukan Pajak
Rp325,915,750

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp325,915,750 dan Rp343,583,409. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	325,915,750	343,583,409
	-	-
Jumlah	325,915,750	343,583,409

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp325,601,579

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp325,601,579 dan Rp325,689,917. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Unaudited) TA 2024 dan 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp3,719,000

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3,719,000 dan Rp1,100,000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	3,719,000	1,100,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	3,719,000	1,100,000

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4,808,138,400 dan Rp4,808,138,400. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Properti Investasi	4,808,138,400	4,808,138,400
-	(786,550,926)	(685,456,042)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	4,021,587,474	4,122,682,358

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
Rp786,550,926

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp-786,550,926 dan Rp-685,456,042. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah
Rp173,666,734,550

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp173,666,734,550 dan Rp173,666,734,550. Nilai Tanah tersebut Terdapat koreksi Luasan dan perubahan kodifikasi yang semula kode : 20101040001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi koide : 2010103999 Tanah Bangunan Industri Lainnya dan tidak merubah nilai perolehan sesuai revidi Itjen R.591/ITJ.2/HP.380/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, surat terlampir.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	173,666,734,550
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	142,324,550,000
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	315,991,284,550

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp19,144,833,632

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp19,144,833,632 dan Rp31,853,441,282. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	31,853,441,282
Mutasi tambah:	
Pembelian	1,477,205,000
Transfer Masuk	311,042,350
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	14,503,355,000
	-
Saldo per 31 Desember 2024	19,138,333,632
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(17,221,463,288)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,916,870,344

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. terdapat pengadaan peralatan dan mesin sebagai berikut :
Kendaraan fungsional Kendaraan Bermotor Roda empat dan tiga, Lemari Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Kursi Besi/Metal, A.C. Split, Televisi, P.C Unit, Lap Top, Tablet PC, dan Printer
- b. Transfer Masuk dari Biro Umum KKP
- c.
- d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- adanya penghapusan peralatan dan mesin
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp33,782,794,141

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp33,782,794,141 dan Rp32,437,070,396. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	32,437,070,396
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	226,818,745
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	32,830,794,141
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(6,449,122,328)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	26,381,671,813

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- terdapat Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa pembangunan mess operator
- terdapat pengembangan nilai aset berupa rehab gedung kantor dan bangunan TPI
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp48,366,544,895

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.48,366,544,895 dan Rp.47,837,126,895. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	47,837,126,895
Mutasi tambah:	
Pembelian	44,448,000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	484,970,000
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	48,366,544,895
Akumulasi Penyusutan s.d.	(35,179,670,912)
Nilai Buku per	13,186,873,983

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- terdapat pembelian berupa pengadaan Instalasi Air Bersih
- terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa pengadaan jalan kompleks pelabuhan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp96,182,000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.96,182,000 dan Rp.96,182,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	96,182,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	96,182,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	96,182,000

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp58,850,256,528 dan Rp70,352,395,268. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	19,144,833,632	(17,221,463,288)	1,923,370,344
2	Gedung dan Bangunan	33,782,794,141	(6,449,122,328)	27,333,671,813
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,366,544,895	(35,179,670,912)	13,186,873,983
4	Aset Tetap Lainnya	96,182,000	-	96,182,000
	Akumulasi Penyusutan	101,390,354,668	(58,850,256,528)	42,540,098,140

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
-		-
-		-
-		-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp88,781,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	88,781,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	14,503,355,000
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	14,592,136,000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	14,592,136,000

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp88,781,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp122,654,824

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp122,654,824 dan Rp163,949,118. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	122,654,824	163,949,118
	-	-
	-	-
	-	-
Total	122,654,824	163,949,118

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

terdapat langganan listrik, air, telepon dan internet bulan desember 2024 yang masih harus dibayar

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgfdsgjahdfihdsdifihsihsf

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp51,156,553

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51,156,553 dan Rp122,281,712. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	51,156,553	122,281,712
	-	-
	-	-
	-	-
Total	51,156,553	122,281,712

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

jhhkjhgjcgjhgjghckj

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tentang konsesii jasa

Ekuitas Rp220,065,023,801

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp220,065,023,801. dan Rp219,420,697,171. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1 Terdapat Aset Berupa Tanah yang Masih Bersengketa dengan Pihak Lain Berdasarkan data dari Tabel : Daftar Aset Tetap Tanah di PPN Brondong

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	LUAS TANAH (M2)
TANAH						
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	5	2000	20.636.550.000	17.624
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	2	2003	7.808.000.000	900
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	3	2004	3.965.775.000	1.103
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	4	2005	21.824.000.000	13.640
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	6	2007	2.852.800.000	1.783
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	7	2008	1.268.800.000	750
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	8	2008	1.430.809.550	894
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	9	2009	113.880.000.000	69.648
JUMLAH					173.666.734.550	

Dari 8 (delapan) NUP aset tanah yang dimiliki terdapat 1 (satu) bidang tanah di Brondong NUP 3 dengan luas tanah 1.103 m2 nilai buku Rp3.965.775.000,00 yang belum bersertifikat dan masih dalam sengketa dengan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) (Persero). Secara fisik aset tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh PPN Brondong, namun sesuai bukti sertifikat Nomor 08 tanggal 14 Juli 2009 tanah tersebut masuk ke dalam wilayah PT. DPS. Adapun kronologis aset tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas tanah 1.103 m2 merupakan bagian dari tanah hasil reklamasi Tahun 2004 yang dilakukan oleh PPN Brondong dengan kontrak Nomor: 423/SPP/PRONAS-04/VI/2004, tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp1.718.747.000,00 dan telah diakomodir dalam Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/24/Kep/413.013/2011, tanggal 5 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Reklamasi kepada PPN Brondong yang berlokasi di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong seluas 16.000 m2 dengan peruntukan sebagai penambahan dermaga pelabuhan perikanan.
- b. PT. DPS memiliki tanah di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong dengan luas tanah 23.596
- c. Pada Tahun 2011, PT. DPS mengirimkan somasi kepada PPN Brondong melalui surat Nomor: 11/2709-10/DS/III/K-3, tanggal 26 Oktober 2011 perihal pemberitahuan dan somasi pembangunan
- d. Atas surat pemberitahuan dan somasi dari PT. DPS, PPN Brondong telah menjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, PT DPS melalui surat Nomor: 947/PPNBr/TU.210/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan ditembuskan kepada kantor BPN Kabupaten Lamongan yang berisi tidak dapat menghentikan pembangunan gardu listrik karena telah sesuai dengan wilayah kerja operasional pelabuhan.
- e. Berdasarkan tembusan surat dari Kepala PPN Brondong Nomor: 947/PPNBr/TU.210/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, BPN Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan surat undangan Nomor: 2425/UND/12.19/XI/2011, tanggal 14 November 2011 dengan agenda pemberian
- f. Pada tanggal 23 November 2011, berdasarkan undangan dari BPN Kabupaten Lamongan Nomor: 2425/UND/12.19/XI/2011, tanggal 14 November 2011, dilakukan pertemuan kedua belah pihak yang dimediasi oleh BPN Kabupaten Lamongan, namun dengan hasil tidak ada.
- g. Dikarenakan PPN Brondong masih meneruskan pembangunan gardu listrik, pada tanggal 23 Desember 2011, PT. DPS melakukan somasi kedua kepada PPN Brondong melalui surat Nomor: 11/3224-12/05/III/K-3, dalam surat tersebut PT. DPS menyampaikan bahwa posisi gardu listrik tersebut dinyatakan oleh BPN dalam sengketa, sehingga meminta PPN Brondong tidak melanjutkan pembangunan gardu listrik beserta instalasinya sampai dengan adanya keputusan dari BPN.
- h. Pada Tahun 2012, PT. DPS melalui surat Nomor: 12/0095-1/D5/III/K-3, tanggal 22 Januari 2012
- i. Dengan adanya surat somasi II dan III dari PT. DPS, maka dilakukan mediasi lanjutan dan pemeriksaan lapangan pada tanggal 30 Januari 2012 yang difasilitasi BPN Kabupaten Lamongan. Namun pihak PT. DPS tidak menghadiri acara tersebut, sehingga Perjanjian Penyelesaian Sengketa yang direncanakan untuk dibicarakan dan dimediasi oleh BPN Kabupaten Lamongan gagal dilakukan. Selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan oleh BPN Kabupaten Lamongan dan PPN Brondong dan PT. DPS yang diwakili oleh Satpam (tidak resmi), namun kunjungan lapangan tersebut juga tidak menghasilkan kesimpulan.

- j. Pada tanggal 27 Agustus 2018 Kepala PPN Brondong bersurat kepada Kepala BPN Kabupaten Lamongan perihal permintaan pengukuran tanah sengketa melalui surat Nomor: B.1060/PPNBr.A/TU.210/VIII/2018. Pada Tahun 2019, telah disampaikan hasil pengukuran tanah tersebut oleh BPN Kabupaten Lamongan melalui surat Nomor: 883/35.24/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 bahwa berdasarkan kegiatan pemetaan hasil pengukuran tersebut di sebelah timur terindikasi overlap dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08 an. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
- k. Pada Tahun 2022, telah dilakukan audiensi antara KKP yang diwakili Biro Keuangan, Staf Keuangan dan PBMN Ditjen Perikanan Tangkap, Bagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap, dan PPN Brondong bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan di Kantor Bupati Lamongan tanggal 14 September 2022 dengan hasil Pemda Lamongan tidak berkeberatan untuk memulihkan fungsi sebagai Fasilitas Umum sesuai Perda Tata Ruang yang merupakan kewenangan Bupati Lamongan, dengan penyelesaian kedua belah pihak 5 menyerahkan seluruh aset di atas tanah dipersengketakan untuk dihibahkan ke Pemda Lamongan. Selanjutnya pihak Pemda Lamongan atas instruksi Bupati Lamongan akan memanggil PT. DPS untuk meminta klarifikasi. Namun, sampai dengan saat ini belum diketahui hasil klarifikasi dari Pemda Lamongan kepada PT. DPS.
- l. Terdapat Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembahasan Usulan Daftar Normatif Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah TA. 2023 Secara Virtual tanggal 22 November 2022 yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dengan maksud melakukan identifikasi bersama terkait status bidang tanah Belum Bersertipikat, blank (tanpa keterangan terkait pensertipikatannya), dan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) sebagaimana yang tersedia pada data Master Aset SIMAN per 24 Oktober 2022. Setelah mendapatkan Bimtek tersebut, PPN Brondong melakukan konsultasi ke KPKNL Surabaya berdasarkan SPT Nomor B.2155/PPNBR/KP.440/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dengan hasil bahwa KPKNL menginstruksikan aset tanah dicatat sebagai kategori K3 akan dilakukan tindak lanjut dengan BPN Kab. Lamongan.